

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KECAMATAN MEDAN BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020

Genaldi Raja Fauzan Hutagaol
NPP. 30.0097
Asdaf Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Prodi Studi Politik Indonesia Terapan
Email: rajafauzan76@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si., M.H.

ABSTRACK

Problem Statement/Background (GAP): Political participation is the process of participation of ordinary citizens who do not have the right to influence decision-making and carry out political decisions. In democracies, it is believed that the higher the level of public participation, the better. In the 2020 Medan Mayor Election, the community, especially people in the city of Medan, have not been fully involved in exercising political rights. This is based on data from the Medan City KPU which shows the percentage of political participation that has not reached the target. **Purpose:** The purpose of this Final Writing is to reveal how the political participation of the community in West Medan District is facing the 2020 Medan Mayor Election and the factors that hinder them in carrying out political participation. **Method:** The method used in writing this Final Report is a descriptive method with an Inductive approach, while the data collection technique used is through interviews, observation, and documentation. In data analysis, the author uses the triangulation method, which ensures the validity of data or information obtained from various sources or different points of view. **Results:** The results of the study show that the intensity of community political participation that occurs in West Medan sub-district is on average classified as an observer category, namely people only exercising their right to vote in the 2020 Medan Mayor election. Lack of political awareness and the cause of the low number of people who still attach importance to work and are not aware of the importance of participating in regional elections in West Medan sub-district. **Conclusion:** the political participation of the people in West Medan District in the Medan Mayor Election is still low even though in the implementation of socialization and campaigns the government has done quite well. There are several factors that cause the low political participation of the community in the Mayor Election because the implementation time is not in accordance with their activities.

Keywords: Political Participation and Regional Head Elections

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Partisipasi politik merupakan proses partisipasi warga Negara biasa yang tidak memiliki hak untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan politik. Di negara demokrasi diyakini bahwa semakin banyak tingkat partisipasi masyarakat akan semakin baik. Dalam Pemilihan Walikota Medan tahun 2020, masyarakat utamanya masyarakat di kota Medan belum sepenuhnya terlibat dalam menggunakan hak politik. Hal ini berdasarkan data dari KPU Kota Medan yang menunjukkan persentase partisipasi politik yang belum mencapai target. **Tujuan:** Tujuan Penulisan Akhir ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana partisipasi politik Masyarakat di Kecamatan

Medan Barat dalam menghadapi Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 serta faktor-faktor yang menjadi penghambat mereka dalam melaksanakan partisipasi politik. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penulisan Laporan Akhir ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Induktif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam analisis data penulis menggunakan metode triangulasi yaitu memastikan keabsahan data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber atau sudut pandang yang berbeda. **Hasil/Temuan:** Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa intensitas partisipasi politik masyarakat yang terjadi di kecamatan Medan Barat rata-rata tergolong dalam kategori pengamat yaitu masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya saja dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Kurangnya kesadaran politik dan menjadi penyebab masih rendahnya banyaknya masyarakat yang masih mementingkan pekerjaan dan belum sadar terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah di kecamatan Medan Barat. **Kesimpulan:** partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Barat dalam Pemilihan Walikota Medan masih rendah padahal dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pemerintah sudah melakukannya dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dikarenakan waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan kegiatan mereka.

Kata Kunci : Partisipasi Politik dan Pemilihan Kepala Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara yang dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem demokrasi, yaitu sistem Demokrasi Pancasila. Sistem ini sudah diadopsi oleh bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan di tahun 1945 meskipun dalam berjalannya waktu terjadi beberapa perubahan sistem demokrasi. Sebuah negara demokratis pada dasarnya memiliki sifat yaitu mengenai seberapa besar peran rakyat dalam menentukan jalannya sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan agar para elit tidak bisa menggunakan kekuasaannya untuk bertindak secara sewenang-wenang. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi “demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan” (Ratna, 2016). Artinya dalam pengambilan keputusan dalam pemerintahan, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengambil keputusan yang berkaitan erat dengan kehidupannya. Demokrasi dipahami sebagai pemerintahan kerakyatan, dimana mayoritas masyarakat secara langsung atau tidak langsung menyetujui keputusan-keputusan pemerintah.

Salah satu wujud pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia adalah diselenggarakannya pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Pemilu atau pemilihan umum merupakan sarana seseorang membangun hubungan masyarakat dalam masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat dengan cara yang halus (persuasif). “Pemilu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diselenggarakan di negara kesatuan Republik Indonesia secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil” (UU No. 7 Tahun 2017, Pasal 1 tentang pemilu). Hal ini untuk mencegah terjadinya kecurangan dan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia. Pemilu atau pemilihan umum sudah ada di Indonesia sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno yang bertujuan untuk memilih perwakilan rakyat di DPR dan Konstituante. Selanjutnya sistem pemilihan umum ditujukan untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya merupakan tugas dan wewenang MPR kemudian diubah dan disepakati untuk digabung ke dalam rangkaian pemilu yang dilakukan

langsung oleh rakyat pada tahun 2002. Selanjutnya kepala daerah (pilkada) diikutsertakan sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu (UU No. 22 Tahun 2007).

Pada masa pandemi Covid-19 yang telah mengancam kesehatan rakyat dan tentunya sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang melibatkan banyak pihak serta memicu kerumunan, Sebagai salah satu cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Presiden menganjurkan serta mengingatkan masyarakat untuk melakukan jaga jarak dan menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak. Atas dasar pertimbangan tersebut dan dengan keadaan mendesak sehingga Presiden mengeluarkan sebuah kebijakan. Mengingat telalu cepatnya penyebaran wabah yang sangat membahayakan tersebut, melalui kekuasaannya yang tertuang dalam pasal 12 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Presiden kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 yang berlaku mulai 31 Maret tentang penetapan kedaruratan kesehatan.

Berdasarkan data yang ditulis dari infopemilu.kpu.go.id pada tanggal menunjukkan bahwa Pemilihan Wali Kota Medan yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2022 telah selesai dilaksanakan dan telah dimenangkan oleh pasangan Bobby Nasution dan Aulia Rachman sebagai pemenang dengan hasil akhir 53,5% atau total memperoleh 393.327 suaradan mengalahkan pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi yang memperoleh 46,5% atau memperoleh 342.580 suara (KPU,2020). Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan pemilihan umum karena partisipasi politik adalah penentu keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Menurut Aulia & Tamara (2019) mengungkapkan bahwa partisipasi adalah ciri terpenting demokrasi. Artinya tidak ada partisipasi berarti tidak ada demokrasi. Tanpa adanya partisipasi mustahil produk- produk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat memenuhi rasa keadilan warga negaranya. Kota Medan merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan. Kota Medan merupakan Kota terbesar Ketiga yang ada di Indonesia yang memiliki keragaman penduduk majemuk

Berdasarkan masalah dan data di atas mampu ditinjau bahwasanya penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait **“Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Medan Barat Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan ”**.

1.2 Kesenjangan Masalah

Permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah disebabkan kurangnya sosialisasi yang dilakukan setiap pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali kota Medan Tahun 2020 masih kurang efektif dan kurang maksimal dengan diadakan sosialisasi secara langsung, maka masyarakat tersebut akan lebih sadar bahwasanya ikut andil dalam Pemilihan Kepala Daerah tersebut diharapkan dapat mengakomodir dan juga memenuhi kepentingan bagi seluruh masyarakat di daerah Kota Medan.

Partisipasi masyarakat kota Medan di setiap Kecamatan menunjukkan bahwa masyarakat kota Medan mempunyai hak pilih yang cukup tinggi. Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020. Namun, rekapitulasi hasil pemungutan suara menunjukkan partisipasi politik Kota Medan masih rendah, hal ini dikarenakan tujuan KPU di kota Medan belum tercapai yaitu meningkatkan partisipasi, Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi di kota Medan masih terbilang kurang partisipatif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks Efektivitas yang dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja. Pertama, skripsi RAHMAT MULIA, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Darussalam Banda Aceh **“PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN NAGAN RAYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2017”**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa

Penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis interaktif yang dilakukan dalam beberapa langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kedua, skripsi DIAN TRIYANI MAHFIROTIK, Universitas Negeri Semarang yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 ”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Misalnya perilaku persepsi, motivasi, dan Tindakan secara holistic dengan deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Ketiga, penelitian Skripsi AHCLAK ASMARA YASA, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Gowa Tahun 2015 ” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memberikan kebenaran hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, melalui kata-kata, dokumentasi serta gambar-gambar.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, Topik dari ketiga penelitian di atas pada dasarnya mempunyai kesamaan konsep dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Di mana terdapat kesamaan terkait “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah”. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yakni terkait peneliti ingin mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menyebabkan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan menganalisis Bagaimana Bentuk Partisipasi Politik Masyarakat di kecamatan Medan Medan barat dalam Pemilihan Wali Kota Medan Tahun 2020, Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan barat dalam Pemilihan Wali Kota Medan Tahun 2020.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian Kualitatif Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan teori Partisipasi politik masyarakat menurut Roth dan Wilson dalam Efriza (2012:151) yang di dalamnya terdiri dari 4 Dimensi, antara lain: Aktivistis, Partisipan, Pengamatan, Apolitis.

Informan pada penelitian ini terdapat 14 informan yang terdiri dari 7 Pegawai KPUD MEDAN, 1 Camat Medan Barat, 1 Sekretaris Camat Medan Barat dan 5 orang masyarakat Kecamatan Medan Barat. sumber data Penelitian ini di peroleh dari sumber data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Sugiyono (2015:104). Penulis menggunakan Teknik analisis Bagi Miles dan Huberman didalam Sialahi (2012: 339-341) terdapat tiga tahapan dalam analisis kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Penegakan Ketertiban Penyakit Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh

Analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Roth dan Wilson dalam Efriza (2012:151) menggambarkan bentuk partisipasi politik warga negara ditinjau dari intensitas kegiatannya sebagai aktivis, partisipan, pengamat, dan apotilis. Untuk menggambarkan bentuk intensitas Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Medan Barat dalam Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 maka penulis akan membahas dan menganalisis berdasarkan teori diatas sebagai berikut.

a. Aktivis

indikator suatu masyarakat dapat dikatakan termasuk dalam kategori aktivitas apabila:

1. Menjadi pejabat politik
2. Menjadi pimpinan partai politik
3. Menjadi pimpinan kelompok kepentingan

Hal ini menunjang Partisipasi Politik Masyarakat di Kecamatan Medan Barat masih kurang partisipatif karena tidak ada yang menduduki jabatan penting baik di partai politik ataupun sebagai tim sukses pasangan calon. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat masyarakat di Kecamatan Medan Barat yang tergolong dalam kategori aktivis dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020 dikarenakan tidak ada Masyarakat di Kecamatan Medan Barat yang mencalonkan diri atau terlibat dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020.

b. Partisipan

indikator suatu masyarakat dapat dikatakan termasuk dalam kategori partisipan apabila:

- a. Menjadi petugas kampanye
- b. Menjadi anggota aktif partai politik
- c. Menjadi bagian kelompok kepentingan
- d. Aktif dalam proyek-proyek sosial.

hasil wawancara penulis bersama Bapak Adi pada tanggal 19 Januari 2023 selaku masyarakat Kecamatan Medan Barat menyatakan bahwa:

“Masyarakat memiliki anggapan bahwa politik adalah kegiatan yang tidak memiliki dampak atau keuntungan namun seiring berjalannya waktu mulai adanya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah kota Medan terkait pentingnya partisipasi membuat kami merasa lebih diperhatikan hingga saat ini.”

Dari pernyataan di atas dapat dikatakan masyarakat sudah mulai menyadari tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih Kepala Daerah yang merupakan bagian dari sarana kedaulatan rakyat. Hal ini merupakan kewajiban setiap Warga Negara Indonesia tanpa memandang Suku, Agama, maupun Rasnya. Adanya Masyarakat di Kota Medan khususnya Kecamatan Medan Barat sangat diperlukan sebagai alat untuk mempengaruhi dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tanpa adanya tokoh politik di Kota Medan tidak bisa mengetahui apa masukan dan kebutuhan dari Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya di Kota Medan sebagai wujud pelaksanaan kesamaan hak dan perlakuan terhadap seluruh masyarakat Kota Medan.

c. Pengamat

indikator suatu masyarakat dapat dikatakan termasuk dalam kategori pengamat apabila:

- a. Menghadiri rapat umum
- b. Memberikan suara dalam pemilihan umum
- c. Menjadi anggota partai politik
- d. Menjadi anggota kelompok kepentingan
- e. Mendiskusikan masalah politik

f. Mengikuti perkembangan politik melalui media massa.

Hasil wawancara Penulis dengan ketua KPU Kota Medan Bapak Aggusyah Ramadhani Damanik pada tanggal 19 Januari 2023, beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat di kota Medan sewaktu pelaksanaan pemilihan Walikota Kota Medan tahun 2020 sudah mulai banyak ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan hadir saat pemungutan suara walaupun belum secara maksimal, harapan saya kedepannya masyarakat di kota Medan mau lebih partisipatif lagi dalam hal partisipasi politik.”

Pernyataan Ketua KPU Kota Medan diatas merupakan harapan terhadap Masyarakat agar mampu memberikan pengaruh dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dimasa mendatang. Jika dilihat kaitannya dengan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Walikota Kota Medan tahun 2020 maka masyarakat mempunyai indicator pada tingkat kategori pengamat walaupun terdapat beberapa indikator belum terpenuhi dengan maksimal namun sudah cukup memenuhi indikator tersebut.

Partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Barat dalam Pemilihan Walikota Medan masih rendah padahal dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pemerintah sudah melakukannya dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dikarenakan waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan kegiatan mereka, adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, masi kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah serta masi kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi menentukan Kepala Daerah Nomor 1 di Kota Medan.

Tabel 3.1

**Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kecamatan Medan Barat
dalam Pelaksanaan Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020**

No	Kelurahan	Jumlah TPS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kesawan	11	2.072	2.418	4.490
2	Silalas	16	2.955	3.187	6.142
3	Glugur Kota	19	2.910	3.126	6.036
4	Pulo Brayon Kota	33	6.549	7.046	13.595
5	Sei Agul	44	8.329	8.818	17.147
6	Karang Berombak	44	8.284	8.576	16.860
	Jumlah	167	31.099	33.171	64.270

Sumber : diolah data dari KPU Kota Medan

Tabel 3.2

Rekapitulasi Pemungutan Suara Kecamatan Medan Barat

NO	Pemungutan Suara	Jumlah
1	DPT + DPTB	64.270
2	Suara yang Masuk	28.448
3	Suara yang sah	27.944
4	Suara yang tidak sah	504
5	Suara yang tidak Masuk (Golput)	34.822

Sumber : diolah data dari KPU Kota Medan tahun 2020

Berdasarkan Tabel 3.2 terkait rekapitulasi pemungutan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Walikota diketahui bahwa dari 63.270 daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan yang dapat mengikuti pemilihan suara tercatat 28.448 masyarakat yang ikut memberika partisipasi. Dari total 28.448 yang masuk terdapat 504 suara yang dinyatakan tidak sah sedangkan suara yang sah mencapai 27.944. Berdasarkan rekapitulasi ini juga dapat diketahui bahwa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya 34.822. Jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemungutan suara masih rendah

d. Apolitik

Kategori apolitik ini memiliki tingkatan bentuk intensitas paling rendah dalam piramida partisipasi politik. Mereka yang termasuk dalam kategori ini merupakan orang yang tidak ingin mengenal dunia politik.

hasil wawancara penulis dengan Bapak Cokro selaku masyarakat di Kecamatan Medan Barat.

“Kami sebagian besar memang masih enggan untuk bergabung atau terlibat dalam kegiatan politik namun tidak ada yang sampe tergolong apolitik,hal ini dapat diketahui karna masyarakat dalam pemilihan Walikota Medan lalu mengetahui siapa calonnya melalui tv,membaca koran ataupun melihat iklan di jalanan yang menampilkan sosok calon yang merupakan tokoh masyarakat sehingga pasti mengikuti perkembangan politik yang ada saat itu.”

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa masyarakat di kecamatan Medan Barat dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020 tidak ada yang masuk dalam kategori apolitik karena setidaknya masyarakat masih mengikuti perkembangan politik yang ada.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Politik Masyarakat Di Kecamatan Medan Barat dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020

Faktor yang menghambat partisipasi politik masyarakat di kecamatan Medan Petisah dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020 sebagai berikut.

1. Pemilih bersikap apatis

Masih tingginya angka Golput (Golongan Putih) merupakan cerminan apatismen rakyat terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai wujud pesta demokrasi tersebut. Golput muncul karena pilihan masyarakat sendiri secara sadar karena kenyataannya dari dulu mulai kampanye sampai pada pemilihan akhirnya tetap sama saja, sehingga ada sebagian orang yang mengabaikan Pemilihan Umum. Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Cokro salah satu masyarakat yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota tahun 2020 mengatakan bahwa:

“Mau saya memakai hak suara saya atau tidak, saya rasa tidak akan ada perubahan dalam hidup saya melalui pemilu ini sehingga lebih baik saya tetapi mencari nafkah dibanding sia-sia datang ke sana.”

2. Adanya warga pindahan namun tidak melapor

Dalam tahapan pendataan ditemukan beberapa masalah terkait data masyarakat dimana ada masyarakat yang pindah ke Kecamatan Medan Barat namun tidak melaporkan ke Pemerintahan setempat sehingga masyarakat tersebut tidak terdaftar dan tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Hal ini didukung oleh pernyataan oleh Bapak Drs. Lilik selaku Camat Medan Barat sebagai berikut:

“Hal ini memang sudah cukup sering terjadi dimana banyak masyarakat yang baru berdomisili atau pindah ke kecamatan Medan Barat namun tidak melapor ke pihak

kelurahan maupun kecamatan jadi data masyarakat tersebut tidak ada dalam daftar pemilih sehingga masyarakat yang tadinya ingin ikut berpartisipasi dalam memberikan hak suaranya tidak bisa dilakukan. Ada juga masyarakat yang melanjutkan pendidikan atau melakukan pekerjaan ke daerah lain sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Walikota Medan tahun 2020.”

3. Kurangnya kesadaran politik dan motivasi

Dilihat dari data yang ada dapat diketahui bahwa sebesar 46,9 % masyarakat Medan Barat dari data pemilih tetap yang ada tidak menggunakan hak pilihnya. Salah satu penyebab ialah ketidak tahuan dan kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam Pemilihan Umum. Selain itu masih lekatnya pemikiran bahwa tidak adanya pengaruh atau keterkaitan siapapun calon Kepala Daerah yang terpilih kepada kehidupan mereka termasuk pekerjaan yang mereka lakukan. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya untuk ikut serta dalam Pemilihan Walikota Medan tahun 2020 merupakan suatu kepedulian masyarakat terhadap masa depan pembangunan daerah Kota Medan.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan hak pilih masyarakat dalam tahapan pemungutan suara masih rendah yakni 27.944 yang menyumbangkan suaranya sedangkan 36.326 orang yang masih belum menggunakan hak pilihnya sehingga masih perlunya peningkatan terhadap kesadaran masyarakat di kecamatan Medan Barat dalam pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Banyak faktor dan kondisi yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat namun kesadaran masyarakat untuk memilih sebagai bentuk kedaulatan rakyat merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat sendiri.

Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Barat dalam Pemilihan Walikota Medan masih rendah padahal dalam pelaksanaan sosialisasi dan kampanye pemerintah sudah melakukannya dengan cukup baik. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota dikarenakan waktu pelaksanaan yang belum sesuai dengan kegiatan mereka, adanya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, masi kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah serta masi kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam partisipasi menentukan Kepala Daerah Nomor 1 di Kota Medan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan serta analisis data yang telah dijabarkan dalam pembahasan penulis kemudian mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi politik masyarakat di Kecamatan Medan Barat belum memenuhi target, Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang masih mementingkan pekerjaan dan belum sadar terhadap pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020
 - a. Faktor yang mendukung pemilih
 1. Tingkat Pendidikan pemilih
 2. keterlibatan orang tua yang memilih untuk pertama kali nya
 3. Pemilih adalah anggota organisasi

4. Status social calon Kepala Daerah
 5. Kandidat Calon Kepala Daerah memiliki potensi untuk memimpin daerah
- b. Faktor yang menghambat pemilih
1. Kondisi ekonomi pemilih yang memprihatinkan
 2. Rendahnya kepercayaan terhadap jumlah calon Kepala daerah
 3. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah
 4. Pekerjaan yang tidak bisa Anda tinggalkan
 5. Sedikit kesadaran tentang pentingnya Pilkada

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini keterbatasan utama yakni waktu. Keterbatasan waktu penulis maksimalkan dalam proses Penelitian ini dalam hal Observasi, Dokumentasi dan Wawancara untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan penulis

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian yang penulis laksanakan, oleh karena itu untuk melengkapi kekurangan dalam penelitian ini penulis berharap ada yang meneruskan penelitian ini agar dapat memaksimalkan hasil dari penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada KPUD Kota Medan beserta jajarannya , Camat Medan Barat dan Sekretaris Camat Medan Barat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian dan membagi pengetahuan kepada peneliti yang tentunya peneliti dapat terapkan pada di dunia kerja nanti. Serta masyarakat yang berperan memberikan informasi pada penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, D., & Tamara, R. A. I. (2019). BENTUK PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT TIONGHOA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DALAM PEMILU 2019. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 96-105.
- Efriza. 2012, *Political Explore*, Sebuah Kajian Ilmu Politik. Alfabeta: Bandung
- Mulia, R. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Nagan Raya dalam Pilkada 2017* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Mahfirotik, D. T. (2017). *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Majalengka Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017*. Semarang: Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Silalahi, U. (2012). *Metodologi analisis data dan interpretasi hasil untuk penelitian sosial kuantitatif*.
- Sugiyono, D. (2015). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- YASA, A.A. (2015). *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Gowa Tahun 2015*. Gowa: Skripsi.
- KPU Kota Medan